

## **BAB V HASIL PENELITIAN**

### **5.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikaji sesuai teori kemudian diinterpretasikan. Dalam hal ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang melalui informasi yang diperoleh dari RAPBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes.

### **5.2 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Analisis pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

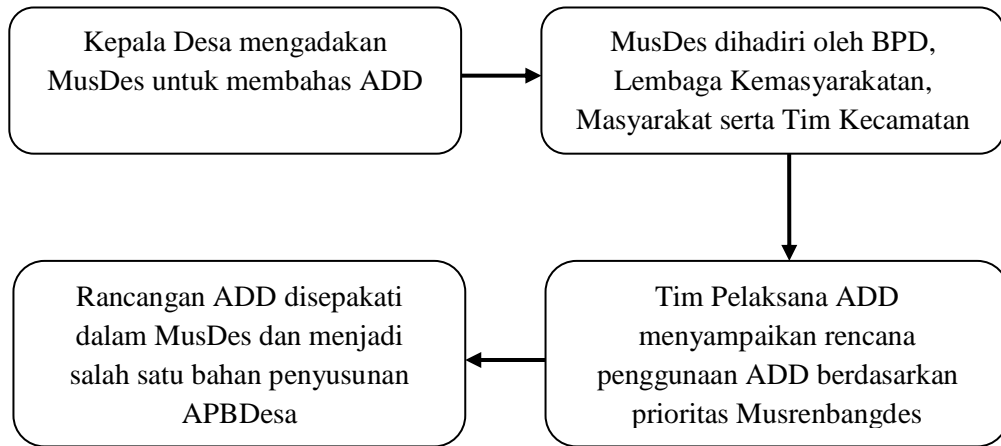
Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Perdes menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan Pelaksanaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara lengkap.

### **5.2.1 Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014-2016**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Implementasi program ADD di Desa Poto juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Mekanisme perencanaan ADD di desa Poto secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut :



**Gambar 5.1 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang**

*Sumber : Data Primer Diolah, 2017*

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta Tim Fasilitasi Kecamatan;
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Berikut ini dapat dilihat Rincian Perencanaan APBDes dan ADD di Desa Poto Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang Tahun Anggaran 2014-2016.

**Tabel 5.1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Poto  
Tahun Anggaran 2014**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA ANGGARAN (Rp)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>		
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>7,650,000</b>	
1.1.1	Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat	4,650,000	
1.1.2	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	3,000,000	
<b>1.2</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>3,500,000</b>	
<b>1.3</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>46,000,000</b>	
	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	13,000,000	
	Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	33,300,000	
<b>1.4</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH</b>	<b>76,500,000</b>	
1.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	2,250,000	
1.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	74,250,000	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>133,650,000</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>133,650,000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>95,400,000</b>	
2.1.1	Gaji dan Tunjangan Penghasilan	60,720,000	
2.1.1.01	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	12,000,000	TPAD
2.1.1.02	Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan	18,000,000	TPAD
2.1.1.03	Tunjangan Penghasilan Kepala Dusun	30,000,000	TPAD
2.1.1.04	Asuransi Kesejahteraan Perangkat Desa	720,000	ADD
2.1.2	Belanja Pegawai	13,250,000	
2.1.2.01	Biaya Operasional RW	2,750,000	Bantuan Propinsi
2.1.2.02	Biaya Operasional RT	10,500,000	Bantuan Propinsi
2.1.3	Belanja Barang Habis Pakai	2,400,000	
2.1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	1,500,000	ADD Rp.1.000.0000 + PAD Rp. 500.000
2.1.3.02	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	500,000	ADD
2.1.3.03	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	ADD
2.1.3.04	Belanja Materai Perangko dan Benda Pos Lainnya	150,000	ADD
2.1.4	Belanja Iuran Tenaga Surya	456,000	PAD
2.1.5	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas	1,500,000	ADD Rp.1.000.0000 + PAD Rp. 500.000
2.1.6	Belanja Foto Copy, Catak dan Penggandaan	474,000	PAD Rp.294.000 + ADD Rp. 180.000
2.1.7	Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu	5,100,000	ADD Rp.2.350.0000 + PAD Rp. 1.500.000 + Bantuan Propinsi Rp. 1.250.000
2.1.8	Belanja Pakian Dinas dan Atribut Aparat Desa	1,150,000	ADD Rp.1.000.0000 + PAD Rp. 150.000

2.1.9	Belanja Perjalanan Dinas	10,350,000	
2.1.9.01	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5,500,000	ADD Rp.2.500.0000 + PAD Rp. 2.000.000 + Pajak Kab. Rp. 1.000.000
2.1.9.02	Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan BPD	3,350,000	ADD
2.1.9.03	Operasional Penagihan Pajak	1,500,000	Pajak Kab. Rp.1.500.000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infarstruktur</b>	<b>27,200,000</b>	
2.2.1	Belanja Pengadaan Mebeulair	6,200,000	ADD
2.2.2	Belanja Pengadaan Gedung Rumah Jabatan Kades	21,000,000	ADD
<b>2.3</b>	<b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>5,800,000</b>	
2.3.1	Belanja Bahan Baku Usaha Anyaman	800,000	ADD
2.3.2	Belanja Pengadaan Laptop 1 Unit	4,000,000	ADD
2.3.3	Belanja Bantuan Benih dan Bibit	1,000,000	ADD
<b>2.4</b>	<b>Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>5,250,000</b>	
2.4.1	Sumbangan Kegiatan HUT RI	4,500,000	Bagi Hasil Pajak + PAD + Bantuan Propinsi
2.4.2	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	750,000	Bagi Hasil Pajak + PAD
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>133,650,000</b>	

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

**Tabel 5.2 Rincian Rencana Anggaran ADD Desa Poto Tahun Anggaran 2014**

KODE REK	URAIAN	JUMLAH RENCANA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>		
<b>1.1</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>46,000,000</b>	
1.1.1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	13,000,000	
1.1.2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	27,200,000	
1.1.3	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5,800,000	
1.1.4	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	-	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>46,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>46,000,000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>13,000,000</b>	
2.1.1	Gaji dan Tunjangan Penghasilan		
2.1.1.01	Asuransi Kesejahteraan Perangkat Desa	720,000	ADD
2.1.2	Belanja Barang Habis Pakai		
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	1,000,000	ADD
2.1.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	500,000	ADD
2.1.2.03	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	ADD
2.1.2.04	Belanja Materai Perangko dan Benda Pos Lainnya	150,000	ADD
2.1.2	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas	1,000,000	ADD

2.1.3	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	180,000	ADD
2.1.4	Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu	2,350,000	ADD
2.1.5	Belanja Pakian Dinas dan Atribut Aparat Desa	1,000,000	ADD
2.1.6	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.6.01	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,500,000	ADD
2.1.6.02	Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan BPD	3,350,000	ADD
<b>2.2</b>	<b>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>27,200,000</b>	
2.2.1	Belanja Pengadaan Mebeulair	6,200,000	ADD
2.2.2	Belanja Pengadaan Gedung Rumah Jabatan Kades	21,000,000	ADD
<b>2.3</b>	<b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>5,800,000</b>	
2.3.1	Belanja Bahan Baku Usaha Anyaman	800,000	ADD
2.3.2	Belanja Pengadaan Laptop 1 Unit	4,000,000	ADD
2.3.3	Belanja Bantuan Benih dan Bibit	1,000,000	ADD
<b>2.4</b>	<b>Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>46,000,000</b>	

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Jumlah Alokasi Dana Desa yang direncanakan Desa Poto Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 46.000.000. Anggaran tersebut direncanakan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu kegiatan pengadaan peralatan kantor, pengadaan mebeulair, pembangunan rumah jabatan kepala desa berjumlah Rp.27.200.000, untuk pemberdayaan kemasayarakatan yaitu belanja modal ternak dan tanaman berjumlah Rp.5.800.000, Sedangkan untuk perencanaan penyelenggaraan pemerintah desa yaitu kegiatan asuransi kesejahteraan perangkat desa dan pembelian alat tulis kantor (ATK) berjumlah Rp. 13.000.000,- .

Analisis ini Menunjukkan bahwa Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2014 **“Sesuai Prinsip ADD”** berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Keb. Kupang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan pengelolaan ADD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana untuk pembangunan dan

pemberdayaan kemasyarakatan sebesar 70%, dan untuk perencanaan penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30%.

**Tabel 5.3 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Poto  
Tahun Anggaran 2015**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA ANGGARAN (Rp)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>437,288,533</b>	
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	15,000,000	
1.2	DANA DESA	299,054,566	
1.3	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2,829,868	
1.4	ALOKASI DANA DESA	118,154,099	
1.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI	2,250,000	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>437,288,533</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>437,288,533</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>133,233,967</b>	
2.1.1	Gaji dan Tunjangan Penghasilan	75,720,000	
2.1.1.01	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	18,000,000	ADD
2.1.1.02	Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan	27,000,000	ADD
2.1.1.03	Tunjangan Penghasilan Kepala Dusun	30,000,000	ADD
2.1.1.04	Asuransi Kesejahteraan Perangkat Desa	720,000	ADD
2.1.2	Belanja Barang Habis Pakai/ Operasional Perkantoran	38,513,967	
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	4,098,967	ADD Rp.2.269.099 + Pajak Kab. Rp. 829.868 + PAD Rp. 1.000.000
2.1.2.02	Belanja Benda Pos	450,000	ADD
2.1.2.03	Belanja Pakian Dinas dan Atribut Aparat Desa	1,400,000	PAD
2.1.2.04	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	250,000	ADD
2.1.2.05	Belanja Foto Copy, Catak dan Penggandaan	600,000	ADD Rp. 500.000 + PAD Rp. 100.000
2.1.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4,715,000	ADD Rp.1.465.000 + Bant Prop. Rp. 1.750.000 + PAD Rp. 1.500.000
2.1.2.07	Belanja Listrik (Tenaga Surya)	500,000	PAD
2.1.2.08	Belanja Makan Minum Rapat	5,800,000	ADD Rp.3.300.000 + PAD Rp. 2.500.000
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas	12,400,000	ADD Rp.6.900.000 + Pajak Kab. Rp. 2.000.000 + PAD Rp. 3.500.000



2.1.2.10	Belanja Peralatan Kantor	8,300,000	ADD
2.1.3	Operasional BPD	4,500,000	
2.1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	150,000	ADD
2.1.3.02	Belanja Makan Minum Rapat	150,000	ADD
2.1.3.03	Belanja Inseentif BPD	4,200,000	ADD
2.1.4	Operasional PKK	1,250,000	
2.1.4.01	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	ADD
2.1.4.02	Belanja Makan Minum Rapat	250,000	ADD
2.1.4.03	Perjalanan Dinas	750,000	ADD
2.1.5	Operasional RT/RW	13,250,000	
2.1.5.01	Inseentif RT	10,500,000	ADD
2.1.5.02	Inseentif RW	2,750,000	ADD
<b>2.2</b>	<b>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>260,054,566</b>	
2.2.1	Pembangunan Posyandu	132,500,000	Dana Desa
2.2.1.01	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2,600,000	Dana Desa
2.2.1.02	Honor Penerima Hasil Pekerjaan	350,000	Dana Desa
2.2.1.03	Biaya Administrasi dan Pelaporan	200,000	Dana Desa
2.2.1.04	Biaya Perencanaan	750,000	Dana Desa
2.2.1.05	Belanja Pengadaan Bahan	128,600,000	Dana Desa Rp. 126.600.000 + Swadaya Rp. 2.500.000
2.2.2	Pembangunan Rabat Beton	127,554,566	Dana Desa
2.2.2.01	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Dana Desa
2.2.2.02	Honor Penerima Hasil Pekerjaan	350,000	Dana Desa
2.2.2.03	Biaya Administrasi dan Pelaporan	151,637	Dana Desa
2.2.2.04	Biaya Perencanaan	750,000	Dana Desa
2.2.2.05	Belanja Pengadaan Bahan	123,802,929	Dana Desa Rp. 121.302.929 + Swadaya Rp. 2.500.000
<b>2.3</b>	<b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>44,000,000</b>	
2.3.1	Belanja Pengadaan Hand Traktor	30,000,000	Dana Desa
2.3.2	Belanja Pengadaan Moto Air dan Perlengkapannya	14,000,000	Dana Desa
<b>2.4</b>	<b>Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>437,288,533</b>	

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

**Tabel 5.4 Rincian Rencana Anggaran ADD Desa Poto  
Tahun Anggaran 2015**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH RENCANA ANGGARAN (Rp)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>118,154,099</b>	
<b>1.1</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>118,154,099</b>	
1.1.1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	118,154,099	
1.1.2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	
1.1.3	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	-	
1.1.4	Belanja Pembinaan Masyarakat	-	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>118,154,099</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>118,154,099</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>118,154,099</b>	
2.1.1	Gaji dan Tunjangan Penghasilan		
2.1.1.01	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	18,000,000	ADD
2.1.1.02	Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan	27,000,000	ADD
2.1.1.03	Tunjangan Penghasilan Kepala Dusun	30,000,000	ADD
2.1.1.04	Asuransi Kesejahteraan Perangkat Desa	720,000	ADD
2.1.2	Belanja Barang Habis Pakai/ Operasional Perkantoran		
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	2,269,099	ADD
2.1.2.02	Belanja Benda Pos	450,000	ADD
2.1.2.04	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	250,000	ADD
2.1.2.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	500,000	ADD
2.1.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,465,000	ADD
2.1.2.08	Belanja Makan Minum Rapat	3,300,000	ADD
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas	6,900,000	ADD
2.1.2.10	Belanja Peralatan Kantor	8,300,000	ADD
2.1.3	Operasional BPD		
2.1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	150,000	ADD
2.1.3.02	Belanja Makan Minum Rapat	150,000	ADD
2.1.3.03	Belanja Insentif BPD	4,200,000	ADD
2.1.4	Operasional PKK		
2.1.4.01	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	ADD
2.1.4.02	Belanja Makan Minum Rapat	250,000	ADD
2.1.4.03	Perjalanan Dinas	750,000	ADD
2.1.5	Operasional RT/RW		
2.1.5.01	Inseentif RT	10,500,000	ADD
2.1.5.02	Inseentif RW	2,750,000	ADD
<b>2.2</b>	<b>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>-</b>	
<b>2.3</b>	<b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>-</b>	
<b>2.4</b>	<b>Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>118,154,099</b>	

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Jumlah Alokasi Dana Desa yang direncanakan Desa Poto tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 118.154.099. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa berjumlah Rp. 118.154.099,-.

Analisis ini Menunjukkan bahwa Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk Tahun Anggaran 2015 **“Tidak Sesuai Prinsip ADD”** berdasarkan Peraturan Bupati Kupang No. 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Pedoman Pengelolaan ADD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak di rencanakan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa, untuk perencanaan penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 100%, digunakan untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Faktor inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam perencanaan ADD Desa Poto Tahun Anggaran 2015.

**Tabel 5.5 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Poto Tahun Anggaran 2016**

KODE REK	URAIAN	JUMLAH RENCANA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>1,154,166,300</b>	
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	14,409,000	
1.2	DANA DESA	671,127,000	
1.3	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2,803,300	
1.4	ALOKASI DANA DESA	465,827,000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN	-	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1,154,166,300</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>1,210,253,700</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>314,624,800</b>	
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	156,900,000	

2.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	99,000,000	ADD
2.1.1.02	Penghasilan Tetap Staff Pemerintah Desa	9,000,000	ADD
2.1.1.03	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	6,000,000	ADD
2.1.1.04	Tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD	42,000,000	ADD
2.1.1.05	Asuransi Kesejahteraan Perangkat Desa	900,000	PAD
2.1.2	Belanja Kegiatan Operasional Perkantoran	48,524,800	
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	6,178,800	ADD Rp.4.434.800 + PAD Rp. 1.744.000
2.1.2.02	Belanja Benda Pos	900,000	ADD
2.1.2.03	Belanja Pakian Dinas dan Atribut Aparat Desa	1,600,000	ADD
2.1.2.04	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	750,000	ADD Rp. 250.000 + PAD Rp. 500.000
2.1.2.05	Cetak dan Penggandaan	1,250,000	ADD
2.1.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7,400,000	ADD
2.1.2.07	Belanja Listrik (Tenaga Surya)	456,000	PAD
2.1.2.08	Belanja Makan Minum Rapat	12,690,000	ADD Rp.12.440.000 + PAD Rp. 250.000
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas	17,300,000	ADD Rp.17.150.000 + PAD Rp. 150.000
2.1.3	Operasional BPD	5,000,000	
2.1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	300,000	ADD
2.1.3.02	Belanja Pakian Dinas dan Atribut	1,200,000	ADD
2.1.3.03	Perjalanan Dinas	2,400,000	ADD
2.1.3.04	Belanja Makan Minum Rapat	1,000,000	ADD
2.1.3.05	Cetak dan Penggandaan	100,000	ADD
2.1.4	Operasional PKK	3,500,000	
2.1.4.01	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	ADD
2.1.4.02	Belanja Pakian Dinas dan Atribut	1,200,000	ADD
2.1.4.03	Belanja Makan Minum Rapat	750,000	ADD
2.1.4.04	Perjalanan Dinas	1,300,000	ADD
2.1.5	Operasional RT/RW	70,200,000	ADD
2.1.6	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1,000,000	ADD
2.1.7	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1,000,000	ADD
2.1.8	Kegiatan Pengelolaan Informasi/ Profil Desa	1,500,000	ADD
2.1.9	Kegiatan Program Penataan Struktur Organisasi Desa	5,000,000	ADD
2.1.10	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	22,000,000	ADD Rp 5.550.000 + Dana Desa Rp. 16.450.000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>399,106,600</b>	
2.2.1	Keg. Pemeliharaan Kantor Desa	875,000	ADD
2.2.2	Keg. Rehabilitasi Kantor Desa	3,750,000	ADD
2.2.3	Keg. Pengadaan Kendaraan Operasional	27,000,000	ADD
2.2.4	Keg. Pembangunan Jalan Rabat Beton	32,773,400	Dana Desa
2.2.5	Pembangunan Pagar Pemisah Wilayah Pertanian	183,791,600	Dana Desa
2.2.6	Keg. Pengadaan Sanitasi dan Air Bersih (Sumur Gali)	111,715,000	Dana Desa
2.2.7	Keg. Pembangunan Perpustakaan dan Taman Baca	39,201,600	Dana Desa
<b>2.3</b>	<b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>367,063,800</b>	
2.3.1	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Pertanian	7,000,000	ADD Rp.5.000.000 + PAD Rp. 2.000.000
2.3.2	Kegiatan Musyawarah Inisiatif Pembentukan BUMDes	3,500,000	Dana Desa

2.3.3	Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan Desa	103,206,000	ADD Rp.64.243.500 + DD Rp. 38.962.500
2.3.4	Kegiatan Pengembangan Kebun Desa (Taman Eden)	207,032,300	Dana Desa
2.3.5	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sekolah	46,325,500	Dana Desa
<b>2.4</b>	<b>Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>117,916,600</b>	
2.4.1	Keg.Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	3,650,000	Dana Desa
2.4.2	Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	2,500,000	Dana Desa
2.4.3	Keg. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	12,000,000	Pajak Rp. 2.803.300 + DD Rp. 9.196.700
2.4.4	Keg. Pelatihan Kelompok Tani	19,500,000	PAD Rp. 1.059.000 + DD Rp. 18.441.000
2.4.5	Keg. Pelatihan Administrasi Desa	17,386,600	ADD Rp. 10.003.700 + DD Rp. 7.382.900
2.4.6	Keg. Pemberian Insentif bagi Tenaga Guru PAUD	24,480,000	ADD
2.4.7	Keg. Pemberian Insentif bagi Posyandu/Kader Kesehatan	38,400,000	ADD
<b>2.5</b>	<b>Bidang tak Terduga</b>	<b>11,541,900</b>	
2.5.1	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat	4,000,000	Dana Desa
2.5.2	Kegiatan Penanggulangan Bencana lain	7,541,900	Dana Desa
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,210,253,700</b>	

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

**Tabel 5.6 Rincian Rencana Anggaran ADD Desa Poto Tahun Anggaran 2016**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH RENCANA ANGGARAN (Rp)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>465,827,000</b>	
1.1	ALOKASI DANA DESA	465,827,000	
1.1.1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	292,074,800	
1.1.2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	31,625,000	
1.1.3	Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	69,243,500	
1.1.4	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	72,883,700	
1.1.5	Bidang tak Terduga	-	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>465,827,000</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>465,827,000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>292,074,800</b>	
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	156,000,000	
2.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	99,000,000	ADD
2.1.1.02	Penghasilan Tetap Staff Pemerintah Desa	9,000,000	ADD
2.1.1.03	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	6,000,000	ADD
2.1.1.04	Tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD	42,000,000	ADD
2.1.2	Belanja Kegiatan Operasional Perkantoran	43,324,800	
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	4,434,800	ADD
2.1.2.02	Belanja Benda Pos	900,000	ADD

2.1.2.03	Belanja Pakian Dinas dan Atribut Aparat Desa	1,600,000	ADD
2.1.2.04	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	250,000	ADD
2.1.2.05	Cetak dan Penggandaan	1,250,000	ADD
2.1.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7,400,000	ADD
2.1.2.08	Belanja Makan Minum Rapat	12,440,000	ADD
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas	17,150,000	ADD
2.1.3	Operasional BPD	5,000,000	
2.1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	300,000	ADD
2.1.3.02	Belanja Pakian Dinas dan Atribut	1,200,000	ADD
2.1.3.03	Perjalanan Dinas	2,400,000	ADD
2.1.3.04	Belanja Makan Minum Rapat	1,000,000	ADD
2.1.3.05	Cetak dan Penggandaan	100,000	ADD
2.1.4	Operasional PKK	3,500,000	
2.1.4.01	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	ADD
2.1.4.02	Belanja Pakian Dinas dan Atribut	1,200,000	ADD
2.1.4.03	Belanja Makan Minum Rapat	750,000	ADD
2.1.4.04	Perjalanan Dinas	1,300,000	ADD
2.1.5	Operasional RT/RW	70,200,000	ADD
2.1.6	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1,000,000	ADD
2.1.7	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1,000,000	ADD
2.1.8	Kegiatan Pengelolaan Informasi/ Profil Desa	1,500,000	ADD
2.1.9	Kegiatan Program Penataan Struktur Organisasi Desa	5,000,000	ADD
2.1.10	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	5,550,000	ADD
<b>2.2</b>	<b>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>31,625,000</b>	
2.2.1	Keg. Pemeliharaan Kantor Desa	875,000	ADD
2.2.2	Keg. Rehabilitasi Kantor Desa	3,750,000	ADD
2.2.3	Keg. Pengadaan Kendaraan Operasional	27,000,000	ADD
<b>2.3</b>	<b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>69,243,500</b>	
2.3.1	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Pertanian	5,000,000	ADD
2.3.3	Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan Desa	64,243,500	ADD
<b>2.4</b>	<b>Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>72,883,700</b>	
2.4.5	Keg. Pelatihan Administrasi Desa	10,003,700	ADD
2.4.6	Keg. Pemberian Insentif bagi Tenaga Guru PAUD	24,480,000	ADD
2.4.7	Keg. Pemberian Insentif bagi Posyandu/Kader Kesehatan	38,400,000	ADD
<b>2.5</b>	<b>Bidang tak Terduga</b>	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>465,927,000</b>	

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Jumlah Alokasi Dana Desa yang direncanakan Desa Poto Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 465.827.000. Anggaran tersebut direncanakan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu kegiatan Rehabilitasi kantor desa, pengadaan kendaraan operasional, pengadaan peralatan kantor desa berjumlah Rp.173.752.000,. Sedangkan untuk

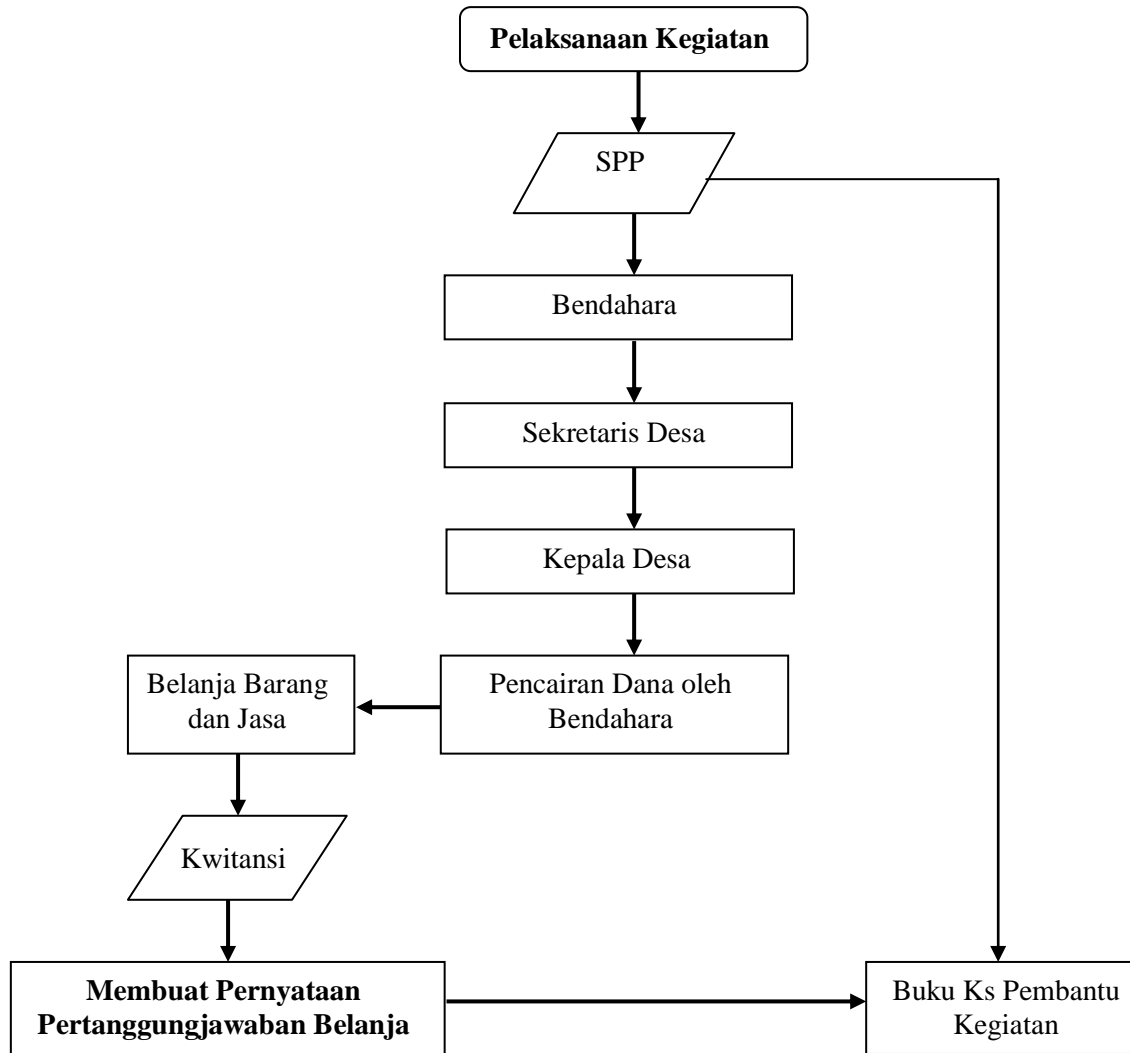
Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa berjumlah Rp. 292.074.800,- .

Analisis ini Menunjukkan bahwa Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2016 **“Tidak Sesuai Prinsip ADD”** berdasarkan Peraturan Bupati Kupang No. 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Pedoman Pengelolaan ADD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 24,7% direncanakan untuk Belanja Kegiatan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pengadaan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan untuk perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 57,2%. Faktor inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam perencanaan ADD desa Poto Tahun Anggaran 2016.

### **5.2.2 Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014-2016**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, Tim Pelaksana Desa memberikan informasi dan penjelasan pelaksanaan kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di desa Poto dalam mendukung pelaksanaan ADD adalah dengan memasang spanduk/ papan Nama yang berisikan semua informasi keuangan dan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan dan selalu mengadakan rapat pembahasan tentang pelaksanaan yang sedang dilaksanakan.

Mekanisme Pelaksanaan ADD di desa Poto secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut :



Sumber : Data Primer Diolah, 2017

**Gambar 5.2 Mekanisme Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang**

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Tim Pengarah, tim pendamping, dan tim fasilitasi. Tim pengarah berasal dari unsur pemerintahan daerah yang bertugas memberikan arahan berupa kebijakan pelaksanaan ADD. Tim fasilitas teknis, berasal dari unsur



pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan, seperti perhitungan ADD. Dan tim pendamping yang bertugas membantu pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### **1. Bendahara**

Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan ADD Desa

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

### **2. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan ADD, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ADD;

- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai ADD, perubahan ADD dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam ADD;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran ADD (SPP).
- f. Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **3. Kepala Desa**

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan ADD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam ADD;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban ADD.

Permohonan pencairan dana ADD di tingkat desa dilakukan berdasarkan usulan permohonan pencairan dari pemohon (Pelaksana

Kegiatan) kepada penanggungjawab anggaran dalam hal ini Kepala Desa setelah melalui proses permohonan pencairan dari bendahara. Untuk pencairan bantuan kepada lembaga desa maupun bantuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat non fisik, lembaga/kelompok tersebut mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa sebesar alokasi dana yang telah ditetapkan dalam RPD dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.

Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan secara Swakelola baik infrastruktur maupun non infrastruktur. Untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa berdasarkan RAB, gambar dan jadwal kegiatan. Setelah pengajuan pencairan dana tersebut pada huruf (d) disetujui Kepala Desa, Bendahara Desa mencairkan dana dan diserahkan kepada LPMD berdasarkan Berita Acara Penyerahan. Untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat fisik Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD untuk setiap 1 (satu) kegiatan fisik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelesaian Pekerjaan, LPMD melaporkan kemajuan realisasi fisik/volume pekerjaan setelah mencapai 100% disertai dengan foto fisik mulai dari 0%, 50% dan 100% dilampiri daftar hadir tenaga kerja dengan menyertakan foto copy KTP masing-

masing pekerja, Daftar bukti pembayaran tenaga kerja, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. Penyerahan dana ADD kepada masing-masing pengelola (BPD, LPMD, PKK dan sebagainya) penyerahannya dilampiri dengan berita acara penyerahan dana;
- e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan menjadi penerimaan pembiayaan APBD Desa Tahun berikutnya;
- f. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) harus disertai Berita Acara Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa.

Berikut ini dapat dilihat Rincian Pelaksanaan ADD di Desa Poto Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang Tahun Anggaran 2014-2016.

**Tabel 5.7 Rincian Pelaksanaan ADD Desa Poto  
Tahun Anggaran 2014**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH REALISASI (Rp)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>			
<b>1.1</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>46,000,000</b>	<b>46,000,000</b>	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>46,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>46,000,000</b>	<b>46,000,000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	
2.1.1	Gaji dan Tunjangan Penghasilan	720,000	720,000	
2.1.1.01	Asuransi Kesejahteraan Perangkat Desa	720,000	720,000	ADD
2.1.2	Belanja Barang Habis Pakai	1,900,000	1,900,000	
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	1,000,000	1,000,000	ADD
2.1.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	500,000	500,000	ADD
2.1.2.03	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	250,000	ADD
2.1.2.04	Belanja Materai Perangko dan Benda Pos Lainnya	150,000	150,000	ADD
2.1.2	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas	1,000,000	1,000,000	ADD
2.1.3	Belanja Foto Copy, Catak dan Penggandaan	180,000	180,000	ADD
2.1.4	Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu	2,350,000	2,350,000	ADD
2.1.5	Belanja Pakian Dinas dan Atribut Aparat Desa	1,000,000	1,000,000	ADD
2.1.6	Belanja Perjalanan Dinas	5,850,000	5,850,000	
2.1.6.01	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,500,000	2,500,000	ADD
2.1.6.02	Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan BPD	3,350,000	3,350,000	ADD
<b>2.2</b>	<b>Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>27,200,000</b>	<b>27,200,000</b>	
2.2.1	Belanja Pengadaan Mebeulair	6,200,000	6,200,000	ADD
2.2.2	Belanja Pengadaan Gedung Rumah Jabatan Kades	21,000,000	21,000,000	ADD
<b>2.3</b>	<b>Belanja Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>5,800,000</b>	<b>5,800,000</b>	
2.3.1	Belanja Bahan Baku Usaha Anyaman	800,000	800,000	ADD
2.3.2	Belanja Pengadaan Laptop 1 Unit	4,000,000	4,000,000	ADD
2.3.3	Belanja Bantuan Benih dan Bibit	1,000,000	1,000,000	ADD
<b>2.4</b>	<b>Belanja Pembinaan Masyarakat</b>	-	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>46,000,000</b>	<b>46,000,000</b>	

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Jumlah Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan/direalisasikan Desa Poto Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 46.000.000. Anggaran tersebut

sesuai dengan perencanaan yaitu untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu kegiatan pengadaan peralatan kantor, pengadaan mebeulair, pembangunan rumah jabatan kepala desa, belanja modal ternak dan tanaman, sebesar 70% yang berjumlah Rp.32.200.000, Sedangkan untuk Pelaksanaan Operasional Desa sebesar 30% yang berjumlah Rp. 13.200.000,- .

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa pada tahun anggaran 2014 ini terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan yang tidak dilakukan secara baik, yakni tidak adanya dokumen SPP untuk beberapa belanja dan juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak disertai dokumen “Pernyataan Tanggungjawab Belanja” dari pelaksanaan kegiatan. Dari hasil telaah dokumen diketahui bahwa pada pos “Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu” dari realisasi anggaran sebesar Rp. 2,350,000, tersebut, sebesar Rp. 630.000,- tidak disertai dengan dokumen SPP dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Hal ini senada dengan pernyataan bapak kepala desa, dimana menurut kepala desa biasanya pada saat membuat laporan pertanggung jawaban baru dibuat beberapa dokumen terkait seperti SPP dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2014 **“Belum dilaksanakan secara baik dan benar”** sesuai Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 5.8 Rincian Pelaksanaan ADD Desa Poto  
Tahun Anggaran 2015**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	
<b>1.1</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	
2.1.1	Gaji dan Tunjangan Penghasilan	75,720,000	75,720,000	
2.1.1.01	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	18,000,000	18,000,000	ADD
2.1.1.02	Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan	27,000,000	27,000,000	ADD
2.1.1.03	Tunjangan Penghasilan Kepala Dusun	30,000,000	30,000,000	ADD
2.1.1.04	Asuransi Kesejahteraan Perangkat Desa	720,000	720,000	ADD
2.1.2	Belanja Barang Habis Pakai/ Operasional Perkantoran	23,434,099	23,434,099	
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	2,269,099	2,269,099	ADD
2.1.2.02	Belanja Benda Pos	450,000	450,000	ADD
2.1.2.04	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	250,000	250,000	ADD
2.1.2.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	500,000	500,000	ADD
2.1.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,465,000	1,465,000	ADD
2.1.2.08	Belanja Makan Minum Rapat	3,300,000	3,300,000	ADD
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas	6,900,000	6,900,000	ADD
2.1.2.10	Belanja Peralatan Kantor	8,300,000	8,300,000	ADD
2.1.3	Operasional BPD	4,500,000	4,500,000	
2.1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	150,000	150,000	ADD
2.1.3.02	Belanja Makan Minum Rapat	150,000	150,000	ADD
2.1.3.03	Belanja Insentif BPD	4,200,000	4,200,000	ADD
2.1.4	Operasional PKK	1,250,000	1,250,000	
2.1.4.01	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	250,000	ADD
2.1.4.02	Belanja Makan Minum Rapat	250,000	250,000	ADD
2.1.4.03	Perjalanan Dinas	750,000	750,000	ADD
2.1.4	Operasional RT/RW	13,250,000	13,250,000	
2.1.4.01	Inseintif RT	10,500,000	10,500,000	ADD
2.1.4.02	Inseintif RW	2,750,000	2,750,000	ADD
<b>2.2</b>	<b>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>-</b>		
<b>2.3</b>	<b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>-</b>		
<b>2.4</b>	<b>Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>-</b>		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Jumlah Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan/direalisasikan Desa Poto Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 118.154.099. Anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan yaitu untuk Pelaksanaan Operasional

penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar 100%, yaitu berjumlah Rp. 118.154.099, sedangkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di laksanakan menggunakan Anggaran Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2015 **“Belum dilaksanakan Secara Baik dan Benar”** sesuai Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Persoalan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2015 terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan yang tidak dilakukan secara baik, yakni tidak adanya dokumen SPP untuk beberapa belanja dan juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak disertai dokumen “Pernyataan Tanggungjawab Belanja” dari pelaksanaan kegiatan. Dari hasil telaah dokumen diketahui bahwa pada pos “belanja alat tulis kantor desa yang realisasi anggarannya sebesar Rp.2.269.099,- tersebut sebagian belanjanya yakni sebesar Rp.342.500,- tidak disertai SPP dan dokumen Pernyataan Tanggung jawab Belanja. Selain itu, pada pos belanja alat tulis kantor juga ditemukan belanja yakni sebesar Rp.550.000, hanya terdapat SPP sedangkan dokumen Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tidak ditemukan (tidak ada).



**Tabel 5.9 Rincian Pelaksanaan ADD Desa Poto  
Tahun Anggaran 2016**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH REALISASI (Rp)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>465,827,000</b>	<b>381,597,700</b>	
1.1	ALOKASI DANA DESA	465,827,000	381,597,700	
1.1.1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	294,174,800	266,374,000	
1.1.2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	31,625,000	26,065,000	
1.1.3	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	69,243,500	16,275,000	
1.1.4	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	72,883,700	72,883,700	
1.1.5	Bidang tak Terduga	-	-	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>465,827,000</b>	<b>381,597,700</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>465,827,000</b>	<b>381,597,700</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>292,074,800</b>	<b>266,374,000</b>	
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	156,000,000	131,200,000	
2.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	99,000,000	81,000,000	ADD
2.1.1.02	Penghasilan Tetap Staff Pemerintah Desa	9,000,000	6,000,000	ADD
2.1.1.03	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	6,000,000	5,500,000	ADD
2.1.1.04	Tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD	42,000,000	40,800,000	ADD
2.1.2	Belanja Kegiatan Operasional Perkantoran	43,324,800	42,974,000	
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	4,434,800	4,434,000	ADD
2.1.2.02	Belanja Benda Pos	900,000	900,000	ADD
2.1.2.03	Belanja Pakian Dinas dan Atribut Aparat Desa	1,600,000	1,600,000	ADD
2.1.2.04	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	250,000	250,000	ADD
2.1.2.05	Cetak dan Penggandaan	1,250,000	900,000	ADD
2.1.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7,400,000	7,400,000	ADD
2.1.2.08	Belanja Makan Minum Rapat	10,340,000	10,340,000	ADD
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas	17,150,000	17,150,000	ADD
2.1.3	Operasional BPD	5,000,000	5,000,000	
2.1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	300,000	300,000	ADD
2.1.3.02	Belanja Pakian Dinas dan Atribut	1,200,000	1,200,000	ADD
2.1.3.03	Perjalanan Dinas	2,400,000	2,400,000	ADD
2.1.3.04	Belanja Makan Minum Rapat	1,000,000	1,000,000	ADD
2.1.3.05	Cetak dan Penggandaan	100,000	100,000	ADD
2.1.4	Operasional PKK	3,500,000	3,500,000	
2.1.4.01	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	250,000	ADD
2.1.4.02	Belanja Pakian Dinas dan Atribut	1,200,000	1,200,000	ADD
2.1.4.03	Belanja Makan Minum Rapat	750,000	750,000	ADD
2.1.4.04	Perjalanan Dinas	1,300,000	1,300,000	ADD
2.1.5	Operasional RT/RW	70,200,000	70,200,000	ADD
2.1.6	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1,000,000	1,000,000	ADD
2.1.7	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1,000,000	1,000,000	ADD

2.1.8	Kegiatan Pengelolaan Informasi/ Profil Desa	1,500,000	1,500,000	ADD
2.1.9	Kegiatan Program Penataan Struktur Organisasi Desa	5,000,000	5,000,000	ADD
2.1.10	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	5,550,000	2,900,000	ADD
<b>2.2</b>	<b>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>31,625,000</b>	<b>26,065,000</b>	
2.2.1	Keg. Pemeliharaan Kantor Desa	875,000	875,000	ADD
2.2.2	Keg. Rehabilitasi Kantor Desa	3,750,000	3,750,000	ADD
2.2.3	Keg. Pengadaan Kendaraan Operasional	27,000,000	21,440,000	ADD
<b>2.3</b>	<b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>69,243,500</b>	<b>16,275,000</b>	
2.3.1	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Pertanian	5,000,000	5,000,000	ADD
2.3.3	Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan Desa	64,243,500	11,275,000	ADD
<b>2.4</b>	<b>Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>72,883,700</b>	<b>72,883,700</b>	
2.4.5	Keg. Pelatihan Administrasi Desa	10,003,700	10,003,700	ADD
2.4.6	Keg. Pemberian Insentif bagi Tenaga Guru PAUD	24,480,000	24,480,000	ADD
2.4.7	Keg. Pemberian Insentif bagi Posyandu/Kader Kesehatan	38,400,000	38,400,000	ADD
<b>2.5</b>	<b>Bidang tak Terduga</b>	-		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>465,827,000</b>	<b>381,597,700</b>	81,91%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

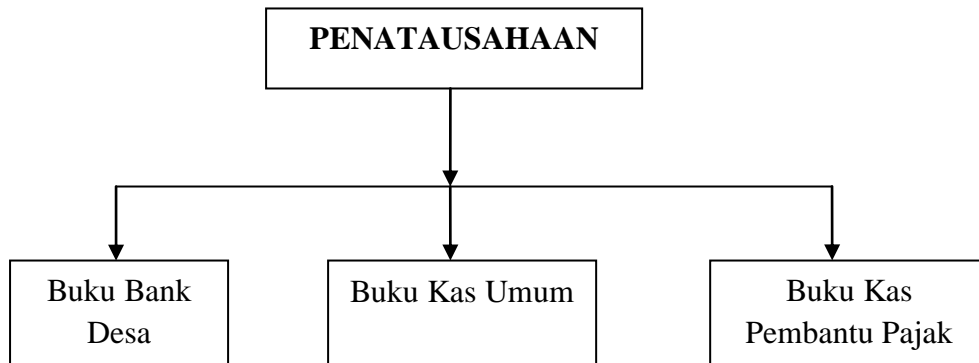
Realisasi pelaksanaan ADD untuk tahun 2016 digunakan untuk bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat sebesar 30,19%, yakni Rp.115.223.700,.- Sedangkan 69,81% yakni sebesar Rp. 266.374.000,- digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Data realisasi di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ini, anggaran ADD yang direalisasikan hanya sebesar 81,91% sedangkan 18,91% atau sebesar Rp.84.229.300- tidak direalisasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Poto, belum melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik.

Hasil penelitian juga diketahui bahwa pada tahun anggaran 2016 ini, persoalan pengelolaan keuangan pada tahap pelaksanaan ini tidak berbeda dengan persoalan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2016 juga masih terdapat beberapa tahapan dalam proses

pelaksanaan yang tidak dilakukan secara baik, yakni tidak adanya dokumen SPP untuk beberapa belanja dan juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak disertai dokumen “Pernyataan Tanggungjawab Belanja” dari pelaksanaan kegiatan. Dari hasil telaah dokumen diketahui bahwa pada bidang pembangunan desa, Bidang pemberdayaan dan bidang pembinaan, terdapat sebagian besar pelaksanaan belanja yang tidak disertai dokumen belanja yakni kwitansi dan pernyataan tanggung jawab belanja. Sebagai contoh pada pos “Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan Desa” yang realisasi anggarannya sebesar Rp. 11.275.000,- tersebut sebagian belanjanya yakni sebesar Rp. 3.230.000,- tidak disertai dokumen kwitansi dan Pernyataan Tanggung jawab Belanja.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2016 **“Belum dilaksanakan Secara Baik dan Benar”** sesuai dengan prinsip/pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### 5.2.3 Analisis Penatausahaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014-2016



Sumber : Data Primer Diolah, 2017

**Gambar 5.3 Mekanisme Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang**

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Tim Pengarah, tim pendamping, dan tim fasilitasi. Tim pengarah berasal dari unsur pemerintahan daerah yang bertugas memberikan arahan berupa kebijakan penatausahaan ADD. Tim fasilitas teknis, berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan, seperti perhitungan ADD. Dan tim pendamping yang bertugas membantu pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## **1. Buku Bank Desa**

Buku bank desa yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan bank (penarikan, penyetoran, bunga bank, administrasi bank, dan lain-lain).

Buku Bank digunakan hanya untuk transaksi yang berkaitan dan memengaruhi saldo pada BANK. Pencatatan dalam Buku Bank juga dilakukan secara kronologis. Tidak ada Kode Rekening dalam Buku Bank sebagaimana buku kas umum. Bukti agar diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Khusus untuk pengisian Bunga Bank, Pajak dan Biaya Administrasi berasal dari rekening koran yang diperoleh Bendahara dari Bank yang bersangkutan.

Saldo menggambarkan akumulasi yang dipengaruhi penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Saldo ini harus dilakukan perbandingan/rekonsiliasi dengan Rekening Koran yang diterima dari Bank tempat menyimpan rekening kas desa. Setiap akhir bulan Buku Bank ini ditutup secara tertib dan ditanda tangani oleh Bendahara Desa, serta Kepala Desa dengan sebelumnya diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

## **2. Buku Kas Umum**

Buku Kas Umum digunakan hanya untuk mencatat transaksi yang bersifat TUNAI. Pencatatan dalam buku kas umum dilakukan

secara kronologis. Kode Rekening digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja sebagaimana tertuang dalam APBDesa. Jika tidak mempengaruhi Belanja seperti pengambilan uang tunai dari bank, pemberian panjar tidak diberi kode rekening. Nomor Bukti agar diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri.

Terkait “jumlah pengeluaran kumulatif” dicatat sebesar akumulasi khusus pengeluaran kas tanpa dipengaruhui penerimaan, sedangkan saldo menggambarkan akumulasi uang yang dipengaruhi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Setiap akhir bulan buku kas umum ini ditutup secara tertib dan ditanda tangani oleh Bendahara Desa, serta Kepala Desa dengan sebelumnya diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

### **3. Buku Kas Pembantu Pajak**

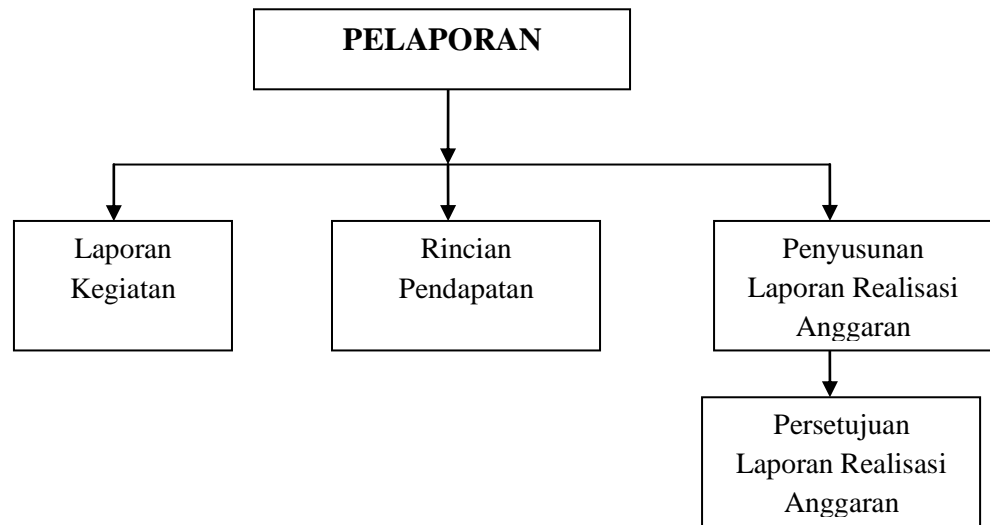
Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat pungutan/potongang yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta pencatatan penyetoran ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundangan. Atas pungutan/potongang dan penyetoran pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum, hanya pada Buku Pembantu Pajak.

Dalam tahapan penatausahaan ini Bendahara Desa Poto tidak menyiapkan/tidak membukukan setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran dalam Buku Kas Umum dikarenakan sumber daya manusia perangkat desa yang kurang memadai dan kurangnya pembinaan/pelatihan terhadap perangkat desa dari instansi terkait. Selain buku kas umum ada pula dokumen buku kas pembantu pajak dan buku bank desa, kedua buku tersebut juga belum disiapkan/belum dibuat oleh Pemerintah Desa Poto.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam tahapan penatausahaan ADD di desa Poto, penulis tidak bisa mendapatkan data yang sah/lengkap dari bendahara Desa Poto dikarenakan buku kas umum, buku bank desa dan buku kas pembantu pajak belum tersedia/tidak dibuat oleh bendahara desa dan pemerintah desa sehingga penulis tidak dapat menganalisis Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu Pajak. Analisis ini Menunjukkan bahwa penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2014-2016 “**Tidak Lengkap**”, berdasarkan Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **5.2.4 Analisis Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014-2016**

Setelah tahap penatausahaan keuangan desa Bendahara Desa Poto wajib menyiapkan dokumen mengenai Laporan Realisasi Penggunaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa Poto memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Mekanisme tahapan Pelaporan Ralisasi Anggaran dapat dilihat pada bagan alir berikut ini.



*Sumber : Data Primer Diolah, 2017*

**Gambar 5.4 Mekanisme Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang**

Laporan tersebut bersifat periodik, semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati Kabupaten Kupang dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati (melalui camat):

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir



bulan Juli tahun berjalan;

- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Dalam tahapan pelaporan ini Bendahara Desa Poto dan Pemerintah Desa Poto tidak menyiapkan/tidak membuat pelaporan kegiatan ADD dikarenakan sumber daya manusia perangkat desa yang kurang memadai dan kurangnya pembinaan/pelatihan terhadap perangkat desa dari instansi terkait.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam tahapan pelaporan ADD di Desa Poto penulis tidak bisa mendapatkan data yang sah/lengkap dari bendahara Desa poto dikarenakan laporan tersebut tidak dibuat oleh bendahara desa dan pemerintah desa sehingga penulis tidak dapat menganalisis Laporan Kegiatan ADD di desa Poto. Analisis ini Menunjukkan bahwa Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2014-2016 “**Tidak Lengkap**”, berdasarkan Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **5.2.5 Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014-2015**

Dalam tahap pertanggungjawaban ADD dibuat pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan sampai pelaksanaan pekerjaan selesai 100%. ADD dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana, sehingga dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Berikut ini dapat dilihat Rincian Pertanggungjawaban ADD di Desa Poto Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang Tahun Anggaran 2014-2016.

**Tabel 5.10 Rincian Pertanggungjawaban ADD Desa Poto Tahun Anggaran 2014**

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SILPA (Rp)	PERTANGGUNG JAWABAN	
					FISIK	KEUANGAN
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>					
<b>1.1</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>46,000,000</b>	<b>46,000,000</b>	-	100%	Lengkap
1.1.1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	13,000,000	13,000,000	-	100%	Lengkap
1.1.2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	27,200,000	27,200,000	-	100%	Lengkap
1.1.3	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	5,800,000	5,800,000	-	100%	Lengkap
1.1.4	Belanja Pembinaan Masyarakat	-	-	-		
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>46,000,000</b>				
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>46,000,000</b>	<b>46,000,000</b>	-	100%	Lengkap
<b>2.1</b>	<b>Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	-	100%	Lengkap
2.1.1	Gaji dan Tunjangan Penghasilan	720,000	720,000	-	100%	Lengkap
2.1.1.01	Asuransi Kesejahteraan Perangkat Desa	720,000	720,000	-	100%	Lengkap
2.1.2	Belanja Barang Habis Pakai	1,900,000	1,900,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	1,000,000	1,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	500,000	500,000	-	100%	Lengkap

2.1.2.03	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	250,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.04	Belanja Materai Perangko dan Benda Pos Lainnya	150,000	150,000	-	100%	Lengkap
2.1.2	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas	1,000,000	1,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.3	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	180,000	180,000	-	100%	Lengkap
2.1.4	Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu	2,350,000	2,350,000	-	100%	Lengkap
2.1.5	Belanja Pakian Dinas dan Atribut Aparat Desa	1,000,000	1,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.6	Belanja Perjalanan Dinas	5,850,000	5,850,000	-	100%	Lengkap
2.1.6.01	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,500,000	2,500,000	-	100%	Lengkap
2.1.6.02	Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan BPD	3,350,000	3,350,000	-	100%	Lengkap
<b>2.2</b>	<b>Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>27,200,000</b>	<b>27,200,000</b>	-	100%	Lengkap
2.2.1	Belanja Pengadaan Mebeulair	6,200,000	6,200,000	-	100%	Lengkap
2.2.2	Belanja Pengadaan Gedung Rumah Jabatan Kades	21,000,000	21,000,000	-	100%	Lengkap
<b>2.3</b>	<b>Belanja Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>5,800,000</b>	<b>5,800,000</b>	-	100%	Lengkap
2.3.1	Belanja Bahan Baku Usaha Anyaman	800,000	800,000	-	100%	Lengkap
2.3.2	Belanja Pengadaan Laptop 1 Unit	4,000,000	4,000,000	-	100%	Lengkap
2.3.3	Belanja Bantuan Benih dan Bibit	1,000,000	1,000,000	-	100%	Lengkap
<b>2.4</b>	<b>Belanja Pembinaan Masyarakat</b>	-	-			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>46,000,000</b>	<b>46,000,000</b>			

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Jumlah Alokasi Dana Desa yang dipertanggungjawabkan Desa Poto Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 46.000.000. Anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan yaitu untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berjumlah Rp. 32.200.000, Sedangkan untuk pertanggungjawaban Operasional Desa yaitu sebesar Rp. 13.200.000,-, untuk semua kegiatan ADD selesai 100% dan Lengkap sesuai dengan kriteria pengelolaan ADD.

Analisis ini Menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2014 **“Sesuai dan Lengkap”** berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Poto Tahun Anggaran 2014.

**Tabel 5.11 Rincian Pertanggungjawaban ADD Desa Poto  
Tahun Anggaran 2015**

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SILPA (Rp)	PERTANGGUNG JAWABAN	
					FISIK	KEUANGAN
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	-	100%	Lengkap
<b>1.1</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	-	100%	Lengkap
1.1.1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	118,154,099	118,154,099	-	100%	Lengkap
1.1.2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	-	-
1.1.3	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Pembinaan Masyarakat	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>		100%	Lengkap
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	-	100%	Lengkap
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>	-	100%	Lengkap
2.1.1	Gaji dan Tunjangan Penghasilan	75,720,000	75,720,000	-	100%	Lengkap
2.1.1.01	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	18,000,000	18,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.1.02	Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan	27,000,000	27,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.1.03	Tunjangan Penghasilan Kepala Dusun	30,000,000	30,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.1.04	Asuransi Kesejahteraan Perangkat Desa	720,000	720,000	-	100%	Lengkap
2.1.2	Belanja Barang Habis Pakai/ Operasional Perkantoran	23,434,099	23,434,099	-	100%	Lengkap
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	2,269,099	2,269,099	-	100%	Lengkap
2.1.2.02	Belanja Benda Pos	450,000	450,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.04	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	250,000	250,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	500,000	500,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,465,000	1,465,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.08	Belanja Makan Minum Rapat	3,300,000	3,300,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas	6,900,000	6,900,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.10	Belanja Peralatan Kantor	8,300,000	8,300,000	-	100%	Lengkap
2.1.3	Operasional BPD	4,500,000	4,500,000	-	100%	Lengkap
2.1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	150,000	150,000	-	100%	Lengkap
2.1.3.02	Belanja Makan Minum Rapat	150,000	150,000	-	100%	Lengkap
2.1.3.03	Belanja Insentif BPD	4,200,000	4,200,000	-	100%	Lengkap
2.1.4	Operasional PKK	1,250,000	1,250,000	-	100%	Lengkap
2.1.4.01	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	250,000	-	100%	Lengkap
2.1.4.02	Belanja Makan Minum Rapat	250,000	250,000	-	100%	Lengkap
2.1.4.03	Perjalanan Dinas	750,000	750,000	-	100%	Lengkap
2.1.4	Operasional RT/RW	13,250,000	13,250,000	-	100%	Lengkap
2.1.4.01	Inseentif RT	10,500,000	10,500,000	-	100%	Lengkap
2.1.4.02	Inseentif RW	2,750,000	2,750,000	-	100%	Lengkap

2.2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	-				
2.3	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-				
2.4	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	-				
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>118,154,099</b>	<b>118,154,099</b>			

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Jumlah Alokasi Dana Desa yang dipertanggungjawabkan Desa Poto Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 118.154.099. Anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan yaitu untuk pelaksanaan Penyelenggaraan pemerintah Desa yaitu sebesar Rp. 118.154.099, untuk semua kegiatan ADD selesai 100% dan Lengkap sesuai dengan kriteria pengelolaan ADD. sedangkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di laksanakan menggunakan Anggaran Dana Desa.

Analisis ini Menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2015 “Sesuai dan Lengkap” berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Poto Tahun Anggaran 2015.

**Tabel 5.12 Rincian Pertanggungjawaban ADD Desa Poto Tahun Anggaran 2016**

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SILPA (Rp)	PERTANGGUNG JAWABAN	
					FISIK	KEUANGAN
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>465,827,000</b>	<b>381,597,700</b>	<b>86,329,300</b>	100%	Lengkap
1.1	ALOKASI DANA DESA	465,827,000	381,597,700	86,329,300	100%	Lengkap
1.1.1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	292,074,800	266,374,000	27,800,800	100%	Lengkap
1.1.2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	31,625,000	26,065,000	5,560,000	100%	Lengkap
1.1.3	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	69,243,500	16,275,000	52,968,500	100%	Lengkap
1.1.4	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	72,883,700	72,883,700	-	100%	Lengkap
1.1.5	Bidang tak Terduga	-	-	-		
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>465,827,000</b>	<b>379,497,700</b>			

<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>	<b>465,827,000</b>	<b>379,497,700</b>	<b>86,329,300</b>	100%	Lengkap
<b>2.1</b>	<b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>292,074,800</b>	<b>266,374,000</b>	<b>25,700,800</b>	100%	Lengkap
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	156,000,000	131,200,000	22,700,000	100%	Lengkap
2.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	99,000,000	81,000,000	18,000,000	100%	Lengkap
2.1.1.02	Penghasilan Tetap Staff Pemerintah Desa	9,000,000	6,000,000	3,000,000	100%	Lengkap
2.1.1.03	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	6,000,000	5,500,000	500,000	100%	Lengkap
2.1.1.04	Tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD	42,000,000	40,800,000	1,200,000	100%	Lengkap
2.1.2	Belanja Kegiatan Operasional Perkantoran	43,324,800	42,974,000	350,800	100%	Lengkap
2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	4,434,800	4,434,000	800	100%	Lengkap
2.1.2.02	Belanja Benda Pos	900,000	900,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.03	Belanja Pakian Dinas dan Atribut Aparat Desa	1,600,000	1,600,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.04	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	250,000	250,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.05	Cetak dan Penggandaan	1,250,000	900,000	350,000	100%	Lengkap
2.1.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7,400,000	7,400,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.08	Belanja Makan Minum Rapat	12,440,000	10,340,000	-	100%	Lengkap
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas	17,150,000	17,150,000	-	100%	Lengkap
2.1.3	Operasional BPD	5,000,000	5,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	300,000	300,000	-	100%	Lengkap
2.1.3.02	Belanja Pakian Dinas dan Atribut	1,200,000	1,200,000	-	100%	Lengkap
2.1.3.03	Perjalanan Dinas	2,400,000	2,400,000	-	100%	Lengkap
2.1.3.04	Belanja Makan Minum Rapat	1,000,000	1,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.3.05	Cetak dan Penggandaan	100,000	100,000	-	100%	Lengkap
2.1.4	Operasional PKK	3,500,000	3,500,000	-	100%	Lengkap
2.1.4.01	Belanja Alat Tulis Kantor PKK	250,000	250,000	-	100%	Lengkap
2.1.4.02	Belanja Pakian Dinas dan Atribut	1,200,000	1,200,000	-	100%	Lengkap
2.1.4.03	Belanja Makan Minum Rapat	750,000	750,000	-	100%	Lengkap
2.1.4.04	Perjalanan Dinas	1,300,000	1,300,000	-	100%	Lengkap
2.1.5	Operasional RT/RW	70,200,000	70,200,000	-	100%	Lengkap
2.1.6	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1,000,000	1,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.7	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembagunnan Desa	1,000,000	1,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.8	Kegiatan Pengelolaan Informasi/ Profil Desa	1,500,000	1,500,000	-	100%	Lengkap
2.1.9	Kegiatan Program Penataan Struktur Organisasi Desa	5,000,000	5,000,000	-	100%	Lengkap
2.1.10	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	5,550,000	2,900,000	2,650,000	100%	Lengkap
<b>2.2</b>	<b>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>31,625,000</b>	<b>26,065,000</b>	<b>5,560,000</b>	100%	Lengkap
2.2.1	Keg. Pemeliharaan Kantor Desa	875,000	875,000	-	100%	Lengkap
2.2.2	Keg. Rehabilitasi Kantor Desa	3,750,000	3,750,000	-	100%	Lengkap
2.2.3	Keg. Pengadaan Kendaraan Operasional	27,000,000	21,440,000	5,560,000	100%	Lengkap
<b>2.3</b>	<b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>69,243,500</b>	<b>16,275,000</b>	<b>52,968,500</b>	100%	Lengkap
2.3.1	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Pertanian	5,000,000	5,000,000	-	100%	Lengkap
2.3.3	Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan Desa	64,243,500	11,275,000	52,968,500	100%	Lengkap
<b>2.4</b>	<b>Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>72,883,700</b>	<b>72,883,700</b>	<b>-</b>	100%	Lengkap
2.4.5	Keg. Pelatihan Administrasi Desa	10,003,700	10,003,700	-	100%	Lengkap

2.4.6	Keg. Pemberian Insntif bagi Tenaga Guru PAUD	24,480,000	24,480,000	-	100%	Lengkap
2.4.7	Keg. Pemberian Insntif bagi Posyandu/Kader Kesehatan	38,400,000	38,400,000	-	100%	Lengkap
<b>2.5</b>	<b>Bidang tak Terduga</b>	-				
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>465,827,000</b>	<b>381,597,700</b>	<b>84,229,300</b>		

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Jumlah Alokasi Dana Desa yang dipertanggungjawabkan Desa Poto Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 465.827.000. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berjumlah Rp. 115.223.700, dan memiliki SILPA Rp. 58.828.500. Sedangkan untuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan pemerintah Desa yaitu sebesar Rp. 292.078.900 dan memiliki SILPA Rp. 28.700.000, dengan Jumlah SILPA ADD berjumlah Rp. 84.229.300 digunakan untuk menutup Defisit di Tahun Anggaran 2016. Untuk semua kegiatan ADD pertanggungjawaban keuangannya Lengkap sesuai dengan kriteria pengelolaan ADD.

Analisis ini Menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Poto untuk tahun Anggaran 2015 **“Sesuai dan Lengkap”** berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Poto Tahun Anggaran 2016.

Hasil-hasil pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari ADD Tahun Anggaran 2014-2016 adalah :



**Tabel 5.13 Hasil-hasil Pembangunan yang bersumber dari  
ADD Tahun Anggaran 2014-2016**

No	Sarana Yang Dibangun	Hasil	Tahun
1	Pembangunan Rumah Jabatan Kepala Desa	Baik	2014
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Kantor Desa	Baik	2016

*Sumber : Data Primer Diolah, 2017*

Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana desa tahun anggaran 2014-2016 di Desa Poto digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Hasil penelitian di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun hasil analisis untuk tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian di ketahui bahwa pada tahap perencanaan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan kemasyarakatan tidak terlalu banyak dianggarkan, dan pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa prosedur yang dilanggar dan tidak di dukung oleh dokumen yang lengkap. Hasil penelitian di ketahui bahwa realisasi sebagian pengeluarannya tidak didukung dengan bukti pelaksanaan yang akurat, dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban belanja pelaksana kegiatan.

Hasil penelitian pengelolaan ADD di Desa Poto yaitu kurang maksimalnya pengelolaan ADD yang dipengaruhi beberapa kendala, yaitu minimnya kualitas sumber daya aparat desa dalam beberapa hal terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan, adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan ADD.

Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal karena Pemerintah Desa Poto lebih mengalokasikan ADD pada penyelenggaraan pemerintahan desa/operasional desa, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan kemasyarakatan tidak terlalu banyak dianggarkan bahkan untuk tahun 2015 tidak dianggarkan dalam perencanaan berdasarkan APBDes tahun tersebut.